



S. Kamran Aksa
Paulus Raga
Ilham Yahya



MANAJEMEN

TRANSPORTASI

DAERAH TERTINGGAL

MANAJEMEN

TRANSPORTASI

DAERAH TERTINGGAL



Angkutan laut seperti perintis, tol laut, maupun penyeberangan untuk menghubungkan daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan serta memperlancar mobilisasi penumpang dan barang untuk memperluas konektivitas ke wilayah 3TP serta mendorong pemerataan pembangunan wilayah. Buku ini diharapkan sebagai refensi dalam mempertimbangkan besaran subsidi untuk pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP). Selama perjalanan, penumpang tentunya akan mengeluarkan biaya selain tiket diantaranya makan dan minum untuk persiapan diatas kapal, dan transportasi di darat dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat dengan biaya sesuai dengan jarak perjalanan. Kemampuan daya beli masyarakat untuk perjalanan dengan transportasi laut masih dirasa terjangkau baik dan tidak berpengaruh pada hari-hari biasa maupun bertepatan dengan hari libur dan hari raya keagamaan.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



MANAJEMEN TRANSPORTASI DAERAH TERTINGGAL

S. Kamran Aksa
Paulus Raga
Ilham Yahya



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

MANAJEMEN TRANSPORTASI DAERAH TERTINGGAL

Penulis : S. Kamran Aksa
Paulus Raga
Ilham Yahya

Editor : Dwi Winarni, S.E., M.Sc., Ak.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Salma Fathina Hanin

ISBN : 978-623-151-264-2

No. HKI : EC00202380501

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JULI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku ini merupakan buah karya yang dilakukan bersama dengan diberi judul **“Manajemen Transportasi Daerah Tertinggal”**. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba membahas permasalahan sistem transportasi laut dan penyeberangan terutama pada tingkat daya beli masyarakat untuk jasa transportasi adalah esensinya merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam upaya masyarakat melakukan perjalanan transportasi laut dengan biaya yang terjangkau. Peranan sistem transportasi pada wilayah tertinggal di Indonesia sebagai backbone antar pulau dalam sistem pergerakan barang dan manusia.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata kami berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR ISTILAH.....	V
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH	
TERTINGGAL	5
A. Wilayah Tertinggal.....	5
B. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	8
C. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	10
D. Strategis Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	13
BAB 3 ASPEK TRANSPORTASI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH.....	20
A. Fungsi Transportasi.....	20
B. Faktor Mempengaruhi Jasa Transportasi	26
C. Pelayanan Transportasi.....	27
D. Pengembangan Wilayah Dan Transportasi	32
E. Indikator Pengembangan Wilayah	35
F. Konektifitas Transportasi Laut.....	39
BAB 4 DAYA BELI MASYARAKAT.....	54
A. Karakterik Minat Daya Beli	54
B. Tujuan Minat Daya Beli	55
C. Pengukuran Daya Beli Masyarakat	57
D. Kemauan dan Kemampuan Daya Beli	58
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR ISTILAH

Pelayaran: Satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim;

Kapal, adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Kapal penumpang, adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digunakan untuk mengangkut lebih dari 12 orang penumpang;

Penumpang, adalah setiap orang yang menggunakan jasa angkutan kapal;

Pelayanan, dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan merupakan suatu usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau alat/mesin dengan tujuan untuk memberikan kepuasan pelanggan;

Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute-rute pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan;

Jaringan prasarana transportasi adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan;

Aksesibilitas, didefinisikan sebagai ukuran kapasitas lokasi yang akan dicapai oleh, atau untuk mencapai lokasi yang berbeda. Oleh karena itu kapasitas dan pengaturan infrastruktur transportasi merupakan elemen kunci dalam penentuan aksesibilitas;

Trayek, adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya

Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/ atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

Trayek Angkutan Laut, terdiri trayek tetap dan teratur (liner), dan trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Menurut PP 20/2010, trayek tetap dan teratur (liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Sedangkan trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur;

Penyelenggara Jasa Angkutan Penumpang, adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan layanan jasa angkutan penumpang dengan menggunakan kapal;

Jaringan Perintis, adalah trayek angkutan laut yang menghubungkan daerah terpencil, daerah yang belum berkembang dan atau daerah perbatasan dengan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi atau pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai akumulasi dan distribusi;

Daerah Terpencil, adalah ukuran untuk suatu daerah ditinjau berdasarkan layanan transportasi yang tersedia, baik transportasi darat, laut maupun udara.

Daerah Tertinggal, adalah ukuran untuk suatu daerah ditinjau berdasarkan ketersediaan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh penduduknya.

Daerah Miskin, adalah ukuran suatu daerah ditinjau berdasarkan tingkat pendapatan penduduk per bulan.

Daya beli jasa, adalah kemampuan dan kemauan orang untuk membayar sesuatu berdasarkan harga yang ditentukan. Dalam hal ini, daya beli jasa transportasi sebagai ukuran untuk menentukan indeks.

BAB 1

PENDAHULUAN

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam lingkup skala nasional. Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena beberapa faktor penyebab, antara lain geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, daerah terisolasi, rawan konflik, dan rawan bencana. Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah tertinggal ini berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan pembangunannya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan.

Kriteria wilayah bisa dikatakan sebagai daerah tertinggal ada 6 (enam), yaitu faktor ekonomi, faktor sumber daya manusia, faktor infrastruktur (prasarana), faktor kapasitas wilayah, faktor aksesibilitas, dan faktor karakteristik daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan program pembangunan daerah tertinggal lebih difokuskan pada percepatan pembangunan di daerah yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur masih tertinggal dibanding dengan daerah lainnya. Kondisi tersebut pada

BAB 2

PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERTINGGAL

A. Wilayah Tertinggal

Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2004), daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Dalam konsep Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004), wilayah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya relatif terpencil, atau wilayah - wilayah yang miskin sumberdaya alam, atau rawan bencana alam. Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu daerah yang secara fisik, sosial, dan ekonomi masyarakatnya mencerminkan keterlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan daerah lain. Selanjutnya, wilayah tertinggal dalam kerangka penataan ruang nasional didefinisikan sebagai wilayah budidaya yang secara ekonomi jauh tertinggal dari rata-rata nasional, baik akibat kondisi geografis, maupun kondisi sosial beserta infrastrukturnya.

Menurut Bappenas (2004), pengertian yang lebih umum menyebutkan bahwa wilayah tertinggal merupakan wilayah pedesaan yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, dan keterbatasan aksesibilitasnya ke pusat-pusat pemukiman lainnya. Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan serta kondisinya relatif tertinggal dari pedesaan lainnya dalam mengikuti dan memanfaatkan hasil pembangunan nasional dan daerah. Pada hakekatnya pelaksanaan program pembangunan daerah

BAB 3

ASPEK TRANSPORTASI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

A. Fungsi Transportasi

Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (*personal place utility*). Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan barang atau mobilitas manusia. Transportasi juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Transportasi berfungsi sebagai sektor penunjang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi. Manfaat Transportasi (perangkutan) bukanlah tujuan melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Sementara itu, kegiatan masyarakat sehari-hari bersangkut paut dengan produksi barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan yang beraneka.

Barang yang diangkut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat atau barang yang dimaksud digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk akhir. Orang yang menggunakan jasa transportasi adalah untuk bekerja, berdagang, menghadiri pertemuan, atau melakukan kegiatan lainnya. Fungsi utama transportasi ada dua, yaitu 1) sebagai penunjang dimaksudkan untuk melayani pengembangan disektor lain yaitu sektor pertanian, industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transmigrasi dan lainnya. dan 2) sebagai pendorong atau pendukung pembangunan, maksudnya bahwa pengadaan/pembangunan

BAB

4

DAYA BELI MASYARAKAT

A. Karakterik Minat Daya Beli

Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perilaku dan minat juga merupakan sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang mereka lakukan. Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Menurut Kinnear dan Taylor minat membeli adalah merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Minat memiliki sifat dan karakter khusus sebagai berikut:

1. Minat bersifat pribadi (individual), ada perbedaan antara minat seseorang dan orang lain.
2. Minat menimbulkan efek diskriminatif.
3. Erat hubungannya dengan motivasi, mempengaruhi dan dipengaruhi motivasi.
4. Minat merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan lahir dan dapat berubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan mode.

Minat beli merupakan suatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu dalam waktu tertentu. Pembelian nyata terjadi apabila konsumen telah memiliki minat untuk membeli sebuah produk. Pembelian nyata merupakan sasaran akhir konsumen dimana

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan;

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang
Penetapan Daerah Tertinggal;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2005
tentang Sistranas, Jakarta.

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor KP 901 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk
Pelabuhan Nasional;

Permen Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

Permen Perhubungan Nomor 109/2017 Tentang Tarif Batas
Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas
Ekonomi

Keputusan Direktorat Jenderal Transportasi Laut Nomor
AL. 108/1/9/DJPL-17 Tentang Jaringan Trayek
Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut Tahun
Anggaran 2018.

Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor:
SK.5706/ AP.204/DRJD/2018 tentang Penetapan
Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Menteri Perhubungan No PM 104/2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 30/2017 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi.

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 124/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 30/2017 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi.

B. Buku Referensi dan Jurnal

Adisasmita, Rahardjo, 2008, Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Adisasmita, Rahardjo, 2010, Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi, Ghalia Ilmu, Jakarta.

Burhanuddin, 2003, Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahari, Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumber Daya Non-Hayati Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan.

Durianto, Darmadi, Dkk, 2003, Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merk, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jinca, M. Yamin, 2007, Dasar-dasar Transportasi, Pusdiklat Aparatur Kementerian Perhubungan.

Kasnawi, Tahir, 2010, Hukum dan Sosial Transportasi, Materi Kuliah Pasca Sarjana Transportasi UNHAS.

Nasution, M, N, 2008, Manajemen Transportasi. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Morlok, Edward K., 1978, *Introduction to Transportation Engineering and Planning*, McGraw-Hill Kogakusha Ltd, Tokyo.

- P Raga, SK Aksa, T Herdian, F Samosir, KNA Ponto, 2021. Pengukuran Indeks Daya Beli Jasa Transportasi Laut Dan Penyeberangan Pada Wilayah Tertinggal, *Jurnal Sistem Transportasi & Logistik*.
- Pressman, 2002, *Soft Engineering A Practitioners Approach*, 5th, Penyunting, New York: McGraw-Hill.
- Purwosutjipto, H.M.N, 2003, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, *Hukum Pengangkutan*, Jilid 3, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Ruru, H, F, 1993, Bahan Kuliah Ekonomi Pengangkutan, Ujung Pandang.
- Salim, Abbas, 2006 *Manajemen Transportasi*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soedjono, 2005, Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Organisasi dan kepuasan Kerja Karyawan pada Terminal Penumpang Umum di Surabaya, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 7 No. 1. STIESIA Surabaya
- Sударsono, J. 1992, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Jakarta: PT Gramedia.
- Sukirno. S, 2006, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Prenada Media Group
- Sugiyono, 2016, *Statistika Untuk Perencanaan*, Alfabeta, Bandung.
- Supawi P, 2016, *Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis*, Surakarta: Program Pascasarjana, UNIBA
- Tamin, Ofyar, Z. 2000, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi* Institut Teknologi Bandung
- Turban, E., Aronson, J. & Liang, T., 2011, *Decision Support Systems and Intelligent Systems (Sistem Pendukung Keputusan dan Sistem Cerdas)*, 7 Jilid 1 Penyunting, Y: Andi Offset.

Widyhartono. 1986. Peranan Transportasi. BPFE: Yogyakarta.

Wunas, Shirly, 2010, Pengembangan Wilayah dan Transporasi, Materi Kuliah, Pasca Sarjana Transportasi UNHAS

William G., Stanton, 2002, Fundamentals of Marketing, Graw Hill International, 10th Edition, Singapore.

C. Buku dan Laporan

Badan Pusat Statistik, 2018, Provinsi Bengkulu Dalam Angka, di Cetak oleh Perum Percetakan Negara RI, Cabang Bengkulu

Badan Pusat Statistik, 2018, Provinsi Gorontalo Dalam Angka.

Badan Pusat Statistik, 2018, Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka.

Badan Pusat Statistik, 2018, Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka

Badan Pusat Statistik, 2018, Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka

Badan Pusat Statistik, 2018, Provinsi Maluku Dalam Angka, di Cetak oleh CV. Sinar Mitra, Ambon.

Badan Pusat Statistik, 2018, Provinsi Maluku Utara Dalam Angka.

Badan Pusat Statistik, 2018, Provinsi Papua Barat Dalam Angka.

Badan Pusat Statistik, 2018, Provinsi Papua Dalam Angka.

Badan Pusat Statistik, 2018, Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017, Pulau Sumatera, Buku I, di Cetak oleh PT. Citra Mawana Patamaro, Jakarta.

- Badan Pusat Statistik, 2018, Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017, Pulau Sulawesi, Buku 4, di Cetak oleh PT. Citra Mawana Patamaro, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2018, Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017, Pulau NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, Buku 5, di Cetak oleh PT. Citra Mawana Patamaro, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Berita Resmi Statistik, No. 32/04/Th. XXII, April 2019, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2018, Indeks Harga Konsumen di 82 Kota di Indonesia (2012=100), ISSN: 2579-3357 No. Publikasi/Publication Number: 06230.1908, Katalog/Catalog: 7102023, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2017, Statistik Transportasi Laut, ISSN: 2598-5620, Nomor Publikasi 06140.1803, Katalog: 8304003, Jakarta.
- Puslitbang Laut Perhubungan, 2012, Penelitian Pelayanan Angkutan Laut Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia, Laporan Akhir, Jakarta.
- Muslihati, 2011, Formulasi Tarif Angkutan Penyeberangan Perintis, Tesis Tidak Diterbitkan, PPs-Unhas, Makassar



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202380501, 13 September 2023

Pencipta

Nama : **Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT., Dr. Ir. Paulus Raga, MT dkk**
Alamat : Puri Patene Permai Blok C5-20 RW 12 RT 3 Kelurahan Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, 90242

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT., Dr. Ir. Paulus Raga, MT dkk**
Alamat : Puri Patene Permai Blok C5-20 RW 12 RT 3 Kelurahan Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, 90242

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Manajemen Transportasi Daerah Tertinggal**

Tanggal dan tempat ditunjukkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 13 Juli 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000513454

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.